



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diganti beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan ...

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Dinas Perikanan	
Kepala Bagian Hukum	

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Dinas Perikanan yang selanjutnya disebut Renstra Dinas adalah Dokumen Perencana Strategis untuk 5 (Lima) Tahun;
2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
3. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah;
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ende untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025-2045;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ende untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2025-2029;
7. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana Pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun;
8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan;
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun;

Program ...

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Dinas Perikanan	
Kepala Bagian Hukum	

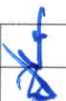
10. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi;
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis Sumber daya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
13. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2029;
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
15. Rencana Kerja Dinas Perikanan yang selanjutnya disebut Renja Dinas adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 1 (Satu) Tahun;
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah Forum antar pelaku dalam rangka menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data Pembangunan Daerah;
18. Daerah adalah Kabupaten Ende;
19. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende;
20. Bupati Ende adalah Bupati Ende;
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;
22. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende;
24. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Ende;
25. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ende;
26. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Ende.

BAB II PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Perencanaan ...

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Dinas Perikanan	
Kepala Bagian Hukum	

- (3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Renstra Dinas disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Ende baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Tujuan penyusunan Renstra Dinas Tahun 2025-2029 adalah:
- a. sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas setiap tahun.
 - b. sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Dinas Perikanan yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) disetiap bidang lingkup Dinas Perikanan.
 - c. sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Ende;
 - d. sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh.
 - e. sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang kelautan dan perikanan mengenai program-program strategis yang akan dikembangkan oleh Dinas Perikanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BAB IV RENCANA STRATEGIS DINAS

Pasal 5

- (1) Renstra Dinas Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta program kegiatan Dinas yang berpedoman pada RPJMD.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. bab I Pendahuluan
 - b. bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - c. bab III Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan
 - d. bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - e. bab V Penutup

Ketentuan ...

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Dinas Perikanan	
Kepala Bagian Hukum	

- (3) Ketentuan mengenai isi dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYUSUNAN DAN PENETAPAN

Pasal 6

- (1) Penyusunan Renstra Dinas melibatkan semua personil aparatur Dinas dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Dinas selama 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan Renstra Dinas didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan serta kondisi yang terjadi yang merupakan program prioritas.

Pasal 7

- (1) Rancangan Akhir Renstra kepada Kepala Bappeda Kabupaten Ende untuk diverifikasi;
- (2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil verifikasi Kepala Bappeda diajukan ke Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati.
- (3) Kepala Dinas menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Renstra Dinas kepada semua Pejabat Pengawas, Administrator dan Pelaksana lingkup Dinas;

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Pejabat Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Dinas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 9

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan Pejabat Administrator lingkup Dinas meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.

Hasil ...

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Dinas Perikanan	
Kepala Bagian Hukum	

- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas mengetahui Sekretaris Dinas.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap pelaksanaan program dan/atau kegiatan.

Pasal 11

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Bidang dan dikoordinasikan dengan sekretaris dinas;
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, dan
b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi dalam rangka pencapaian Renstra dinas.

Bagian Ketiga Perubahan

Pasal 12

- (1) Renstra Dinas dapat diubah dalam hal:
a. terjadi perubahan yang mendasar, atau
b. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
(2) Perubahan Rencana Strategis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra Dinas, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang sesuai kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

BAB VIII ...

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Dinas Perikanan	
Kepala Bagian Hukum	

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

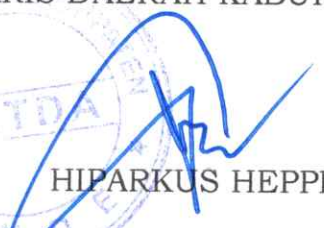
Ditetapkan di Ende
pada tanggal 25 November 2025

BUPATI ENDE,

YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

Diundangkan di Ende
pada tanggal 26 November 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE


HIPARKUS HEPPI

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 NOMOR 45

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Dinas Perikanan	
Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Dinas Perikanan	



RENCANA STRATEGIS
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 - 2029



DINAS PERIKANAN
KABUPATEN ENDE
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

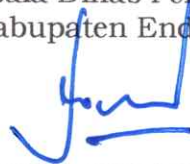
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas Berkat dan Penyertaan-Nya maka Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kab. Ende Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan dan disusun dengan baik sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap perangkat daerah pemerintahan diwajibkan membuat Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2025 - 2029 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Ende tahun 2025 - 2029 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Ende yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Dinas Perikanan Kabupaten Ende berkomitmen untuk Meningkatkan Produktivitas Perikanan, Dalam Rangka Mendukung Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Ende **“Terwujudnya Kabupaten Ende Yang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Berbasis Iman dan Budaya Menuju Ende Lio Nage Sare Pawe”**.

Ahkirnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik melalui usaha pemikiran dan masukan dokumen Rencana Strategis (P- RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 ini tersusun dengan baik, Dinas Perikanan menyampaikan terimakasih dan penghargaan. Semoga Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Ende ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Ende.

Plt. Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Ende,



RISWANTO ISMAIL, S.Pi

PEMBINA TK. I

NIP : 19760507 200604 1 016

ISI DAN URAIAN RENSTRA DINAS PERIKANAN

A. DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERATURAN BUPATI ENDE	ii
ISI DAN URAIAN RENSTRA DINAS PERIKANAN.....	iii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar HukumPenyusunan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN ENDE.....	7
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Ende	7
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis.....	30
III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
3.1 Tujuan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2025-2029	37
3.2 Sasaran Renstra Dinas Perikanan Tahun 2025-2029.....	38
3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perikanan Tahun 2025-2029	40
3.4 Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perikanan Tahun 2025-2029.....	42
IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	43
4.1 Uraian Program.....	43
4.2 Uraian Kegiatan	43
4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	55
4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah	66
4.5 Uraian Sub Kegiatan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD.....	67

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci(IKK)..... 67

V. PENUTUP..... 69

B. DAFTAR TABEL

TABEL BAB II

2.1	Komposisi pegawai menurut jenis kelamin	12
2.2	Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	12
2.3	Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang	12
2.4	Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti DIKLAT Struktural	13
2.5	Jumlah Pegawai yang Telah mengikuti DIKLAT Teknis	13
2.6	Kondisi Aset dinas perikanan TA. 2019 – 2021	14
2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kab. Ende TA. 2019 – 2021.....	19
2.8	Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah Dinas Perikanan Kab. Ende TA. 2019–2021.....	21
2.9	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kab.Ende Tahun 2020-2024.....	25
2.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kab. Ende TA. 2022 – 2024	27
2.2.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	31
2.2.2	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	34

TABEL BAB III

3.3	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Resntra PD	39
3.4	Penahapan Renstra Perangkat Daerah.....	41
3.5	Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....	42

TABEL BAB IV

4.2.	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Perikanan.....	45
4.3.	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	56
4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	66
4.5.	Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan	67
4.6	Indikator Kinerja Kunci	68

C. DAFTAR GAMBAR

GAMBAR BAB II

2.1	Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kab. Ende.....	11
2.2	Trend Produksi perikanan 2019-2021.....	15
2.3	Trend Angka Konsumsi Ikan 2019-2021	16
2.4	Trend Produksi Garam 2019-2021.....	17
2.5	Grafik Trend Cakupan Bina Kelompok	17

GAMBAR BAB III

3.1	Konsep Renstra Perangkat Daerah.....	37
3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah	38

GAMBAR BAB IV

4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Perikanan.....	44
-----	---	----

D. DAFTAR LAMPIRAN

Pembentukan Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Peraturan
Bupati Tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Ende
Tahun 2025-2029.....

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Ende disusun berdasarkan Mekanisme dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tujuan dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra PD tersebut berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Oleh sebab itu, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi periode 2025-2029 yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Penyusunan dokumen Rencana Strategis merupakan pelaksanaan amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam pasal 272 ayat 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah. Oleh sebab itu, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi periode 2025-2029, Dinas Perikanan Kabupaten Ende harus menyusun Renstra PD periode tahun 2025-2029. Dokumen ini diharapkan dapat memberikan arah dan strategi penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Dinas Pariwisata Kabupaten Ende pada tahun 2025-2029.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perikanan Kabupaten Ende harus mendasarkan pada kebijakan Nasional, RPJP, RPJM, RPJPD, RPJMD dan Renstra PD. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menetapkan Renstra Perangkat Daerah untuk periode lima tahun.

Dinas Perikanan Kabupaten Ende merancang Renstra Perangkat Daerah mempunyai maksud sebagai pedoman untuk menjabarkan visi, misi, tujuan hingga kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan kabupaten Ende bagi pemangku kepentingan, baik dalam lingkungan pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Ende Tahun 2025- 2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
7. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 341 Tahun 2014);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 004 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0132);
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 003 Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur : (3-42/2025), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0136 ;
24. Peraturan daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11);
25. Peraturan daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman perencanaan dan penganggaran kabupaten ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 Nomor 3 Tanggal 20 Agustus) (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 3).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2025-2029 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Ende.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- (1) Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025- 2029 kedalam rencana strategis Dinas Perikanan Kabupaten Ende agar terwujud sinkronisasi

perencanaan pembangunan;

- (2) Menjabarkan visi dan misi Kabupaten Ende kedalam tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan-kegiatan operasional;
- (3) Membangun komitmen, konsistensi dan kontinuitas perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat :

1. Latar Belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
 - b. Sumber daya Perangkat Daerah;
 - c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai tupoksinya); dan
 - d. Kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah).
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III paling sedikit memuat:

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat:

1. Uraian Program;

2. Uraian kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS PERIKANAN KABUPATEN ENDE

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Ende

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Ende

A. Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Ende, maka tugas Dinas Perikanan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten di bidang Perikanan.

B. Fungsi

1. Merumuskan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
2. Melaksanakan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan,penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
4. Melaksanakan fungsi lain yang terkait Bidang Kelautan dan Perikanan yang diberikan oleh Bupati.

C. Struktur

1. Kepala Dinas;

Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala Daerah dimana Kepala Dinas mempunyai fungsi :

 - a. Merumuskan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikn (TPI) dan pengelolaan Pembudidayaan ikan;

- b. Melaksanakan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikn (TPI) dan pengelolaan Pembudidayaan ikan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikn (TPI) dan pengelolaan Pembudidayaan ikan;
- d. Melakukan fungsi lain yang terkait bidang Perikanan yang diberikan Bupati.

2. Sekretariat :

1) Sekretaris;

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi program, umum dan kepegawaian serta keuangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar. Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Memverifikasi pengelolaan surat menyurat;
- b. Mengkoordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan program/kegiatan, evaluasi dan pelaporan;
- d. Mengkoordinasikan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan menyelenggarakan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga;
- b. Menyusun dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi merencanakan kebutuhan pegawai, pembinaan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat pegawai, pensiunan pegawai, kenaikan gaji berkala pegawai;
- c. Menghimpun dan mengelola data kepegawaian;
- d. Merencanakan, menyediakan, mengatur penggunaan dan memelihara perlengkapan kantor, bangunan kantor/gedung kebutuhan alat alat penunjang kegiatan kerja;
- e. Menyusun pendoman pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
- f. Menyusun dokumen dan perpustakaan, menyajikan data dan informasi serta humas;
- g. Melaksanakan pendataan dan pemeliharaan barang milik daerah/ Negara;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

- 3) Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Pengembangan Perikanan Tangkap terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang Pengembangan Perikanan Tangkap;

Bidang Pengembangan Perikanan Tangkap mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pengembangan perikanan tangkap sesuai karakteristik dan potensi daerah serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Kepala Bidang Pengembangan Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:

 - a. Menyusun rencana kerja bidang perikanan tangkap sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. Merumuskan kebijakan teknis pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di bidang perikanan tangkap yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik wilayah;
 - c. Mengelolah urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan tangkap;
 - d. Merumuskan sistem pembinaan dan penguatan kelembagaan nelayan serta pemberdayaan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi nelayan kecil ; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain, yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perikanan terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perikanan;

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perikanan mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan operasional, memfasilitasi perumusan kebijakan, mengedalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten serta pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

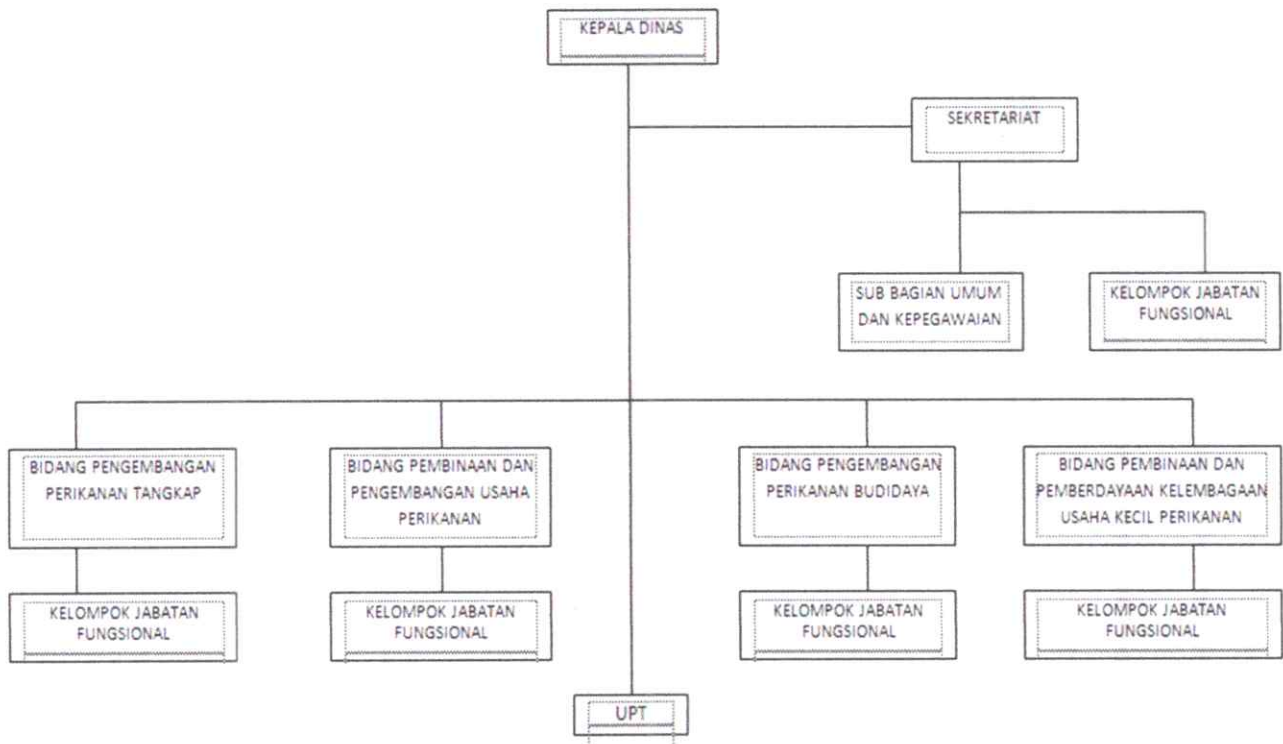
Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perikanan Mempunyai Fungsi:

 - a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan menyusun rencana kerja bidang pembinaan dan pengembangan usahan perikanan sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan proses pelayanan administrasi perijinan serta kegiatan pemantauan dan evaluasi proses pemberian perijinan;
 - c. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan mutu dan pemasaran, pengembangan sumber daya manusia, kelembagaan dan pemberdaan masyarakat serta bimbingan usaha di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

- d. Merumuskan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Pengembangan Perikanan Budidaya terdiri dari :
- 1) Kepala Bidang Pengembangan Perikanan Budidaya;
- Bidang Pengembangan Perikanan Budidaya mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pengembangan pembudidayaan ikan sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- Bidang Pengembangan Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:
- a. Menyusun rencana kerja bidang perikanan budidaya;
 - b. Merumuskan kebijakan teknis pengelolaan kawasan budidaya serta penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik wilayah;
 - c. Mengendalikan kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan serta pembinaan dan pengendalian mutu sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
 - d. Merencanakan pola pengemangan, perekayasa teknologi dan pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Kecil Perikanan terdiri dari :
- 1) Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Kecil Perikanan;
- Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan kelembagaan usaha kecil perikanan mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan operasional, memfasilitasi perumusan kebijakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku
- Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Kecil Perikanan mempunyai fungsi :
- a. Menyusun rencana kerja bidang pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan usaha kecil perikanan sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. Merumuskan sistem pembinaan dan pendampingan serta penguatan kapasitas SDM melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi usaha kecil perikanan;

- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama/kemitraan usaha kelompok masyarakat perikanan dengan pihak ketiga (BUMN/BUMD dan pelaku usaha di bidang perikanan);
 - d. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional;

BAGAN STUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN ENDE



Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DISKAN Ende, Desember 2021

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Ende

2.1.2 Sumber Daya Dinas Perikanan Kabupaten Ende

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah seluruh pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Ende sebanyak 32 orang yang dapat dirincikan menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan serta menurut pangkat/golongan ruang. Berdasarkan jenis kelamin, komposisi pegawai Dinas Perikanan Kab. Ende sebagian besar terdiri dari pegawai laki-laki yaitu sebanyak 18 orang dan jumlah pegawai perempuan yaitu sebanyak 14 orang sedangkan, komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai memiliki kualifikasi Sarjana (S1) yaitu sebanyak 27 orang, Diploma IV sebanyak 1 orang, Diploma III sebanyak 1 orang dan SLTA yaitu sebanyak 3 orang.

Dilihat dari rincian berdasarkan pangkat / golongan ruang, sebagian besar pegawai Dinas Perikanan berpangkat / golongan ruang setingkat Pembina TK. I, Pembina, Penata TK. I, Penata, Penata Muda TK. I, Penata Muda dan Pengatur sedangkan sebagian kecil pegawai adalah ASN P3K. Secara lengkap komposisi

pegawai menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan dan pangkat/golongan ruang sampai dengan keadaan Bulan Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.1 : Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	2	3
1	Laki – Laki	18
2	Perempuan	14
	Jumlah	32

Tabel. 2.2 : Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	2	3
1	Pasca Sarjana (S2)	-
2	Sarjana (S1)	27
3	Diploma IV (D-IV)	1
4	Diploma III (D-III)	1
5	SLTA	3
	Jumlah	32

Tabel. 2.3 : Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah (org)
1	2	3
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina TK. I (IV/b)	1
3	Pembina (IV/a)	4
4	Penata Tk I (III/d)	10
5	Penata (III/c)	3
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	3
7	Penata Muda (III/a)	2
8	Pengatur Tk. I (II/d)	1
9	Pengatur (II/c)	-
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-
11	Pengatur Muda (II/a)	-
	Jumlah	25
1	P3K	7
	Jumlah	7
	Jumlah Keseluruhan	32

Disamping kualifikasi berdasarkan jenjang pendidikan yang dimiliki pegawai, sampai dengan Bulan Desember 2024, beberapa pegawai Dinas Perikanan Kab. Ende juga telah tercatat pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Struktural seperti tersaji pada Tabel berikut :

Tabel. 2.4: Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

No	Jenis Diklat	Jumlah (org)
1	2	3
1	Adum / Adumla/PIM IV	4
2	Spama / Diklatpim III	1
3	Spamen / Diklatpim II	-
	Jumlah	5

Tabel. 2.5: Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis

No	Jenis Diklat	Tahun / Org					Jumlah
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DIKLAT PPNS Perikanan		1				1
2	DIKLAT Fungsional Perencanaan TK. Muda	-	-	-	-	-	-
3	DIKLAT PPL Perikanan TK. Dasar / Pemula	3	-	-	-	-	3
4	Magang Teknik BD. Air Tawar	-	-	-	-	1	1
5	Magang Teknik Konstruksi Kapal Ikan FBR	-	1	-	-	1	2
6	Magang Teknik Pemeriksaan / Pengujian Mutu hasil Perikanan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	3	1	-	-	2	6

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Untuk mendukung pelaksanaan dan tugas pokok Dinas Perikanan Kabupaten Ende, maka dalam jangka waktu Tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 telah memiliki aset-aset sebagai berikut :

- a) Tanah Seluas 11.118 M² Tanah Perkantoran PPI Paupanda yang merupakan Bantuan propinsi pada tahun 1993 yang sudah dihibahkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada LANAL.
- b) Tanah Seluas 8.495 M² bersertifikat berada di Kecamatan Maurole Desa Keliwumbu sebagai lokasi pos pengawasan wilayah utara Kabupaten Ende.
- c) Tanah seluas 774 M² bersertifikat dan bangunan seluas 440 M² berlokasi di Jalan Mahoni Kelurahan Kotaraja Kecamatan Ende Utara sebagai lokasi Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Ende yang baru.

Rincian Kondisi Aset Dinas Perikanan kabupaten Ende tahun 2024:

Tabel. 2.6 : Kondisi Aset Dinas Perikanan Kab. Ende

No	Jenis Aset	Vol	Sat.	Kondisi Aset			
				B	RB	RS	RR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gedung Kantor PPI	1	Unit		1		
2	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	Unit		1		
3	Gedung Pabrik Es Tahun 2007	1	Unit		1		
4	Cold Storage 2001	1	Unit		1		
5	Pabrik Es 2018	1	Unit				1
6	Genzet 50 KVA	1	Unit		1		
7	Bengkel Nelayan	1	Unit				1
8	Laboratorium	1	Unit				1
9	Balai Pertemuan Nelayan	1	Unit				1
10	Cold Storage 2018	1	Unit				1
11	Pos Pengawasan	2	Unit				2
12	Rumah Andon	2	Unit	2			
13	Mess TPI	1	Unit	1			
14	Gedung Kantor	1	Unit				1
15	SPBUN Nelayan	1	Unit		1		
16	Speed Boat Patroli	3	Unit		3		
17	Kendaraan Roda 4	2	Unit	1			1
18	Kendaraan Roda 2	27	Unit	3	17		7
19	Mesin Es Curah	1	Unit		1		
20	Mesin Bor	1	Unit		1		
21	Radio Pantai	1	Unit		1		

Keterangan

B : Baik

RB : Rusak Berat

RS : Rusak Sedang

RR : Rusak Ringan

2.1.3 Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Perikanan dalam kurun waktu tahun 2019 – 2024 telah berdampak signifikan bagi kemajuan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan.

Pelayanan Urusan Kelautan dan Perikanan diarahkan dalam mencapai sasaran meningkatnya produksi perikanan, pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan bagi masyarakat, meningkatnya pembinaan kelompok-kelompok nelayan, pembudidayaan pemasaran hasil perikanan serta kontribusi Dinas Perikanan terhadap PAD. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan didasarkan pada Renstra 2019-2024 (Tahun 2019-2021) dan Perubahan Renstra 2019-2024 (Tahun 2022-2024).

Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan didasarkan pada Renstra 2019-2024 (Tahun 2019-2021) adalah sebagai berikut :

a. **Meningkatnya Produksi Ikan**



Gambar 2.2. Trend Produksi perikanan 2019-2021

Gambar di atas menunjukkan bahwa tahun 2019 produksi perikanan mencapai 9290,95 Ton (37,84%) dari yang ditargetkan sebesar 9363,70 Ton, produksi tahun 2020 mencapai 9.457,771 Ton (45,66%) dari target produksi 10.300 Ton atau sebesar 49,73% dan untuk produksi ikan tahun 2021 sebesar 9.551,509 ton (46,11%) dari target produksi yakni yang ditargetkan sebesar 11.330 ton atau sebesar 54,70%. Produksi hasil Perikanan pada Tahun 2019, 2020, dan tahun 2021 mengalami kenaikan produksi tiap tahun. Pada tahun 2020 produksi ikan mengalami kenaikan sebesar 167 Ton dengan capaian realisasi mencapai 1,8 % dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan jumlah produksi ikan sebanyak 94 Ton dengan realisasi capaian sebesar 1,0 % dari tahun 2020. Tetapi kenaikan tersebut tidak mencapai target kenaikan yang telah ditetapkan sehingga tidak mencapai realisasi capaian Target RPJMD pada Tahun 2019, 2020 dan tahun 2021. Hal ini dikarenakan, dimana produksi ikan tahun 2020 mengalami penurunan produksi dari target yang ditetapkan diakibatkan adanya pandemic covid-19, sehingga berpengaruh pada produktivitas hasil tangkapan. Sedangkan produksi ikan tahun 2021 tidak mencapai target RPJMD diakibatkan adanya badai seroja yang menyebabkan kerusakan dan hanyutnya kapal/perahu yang terbawa arus. Selain itu SDM Nelayan hanya mampu mengoperasikan sarana penangkapan berukuran kecil, dan terbatas serta minimnya kegiatan pelatihan teknis penangkapan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam meningkatkan Produktivitas hasil tangkapan ini, dengan melalui penambahan jumlah Sarana dan Penangkapan ikan yang didistribusikan kepada kelompok masyarakat Nelayan dalam upaya meningkatkan produktivitas perikanan, serta pelatihan teknis dalam meningkatkan sumber daya manusia pada kelompok nelayan baik dalam pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penangkapan ikan.

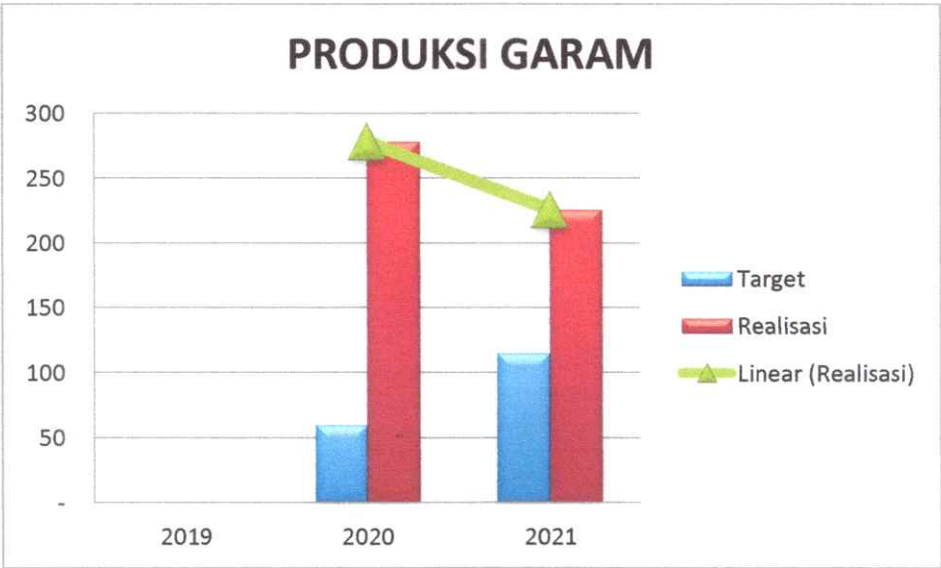
b. Meningkatnya Konsumsi Ikan



Gambar 2.3. Trend Angka Konsumsi Ikan 2019-2021

Gambar diatas menunjukkan bahwa realisasi capaian kinerja tahun 2019 sebesar 34,14 Kg/Kapita/Org atau sebesar 97,54% dengan capaian Indikator Kinerja sebesar 104,21% dimana angka realisasi tersebut melebihi Target RPJMD Tahun 2019 yakni sebesar 33,90 Kg/Kapita/Org atau sebesar 96,86%. Selanjutnya capaian kinerja Tingkat Konsumsi Ikan masyarakat pada tahun 2020 sebesar 34,44 Kg/Kapita/Org atau sebesar 98,40% dengan capaian Indikator Kinerja sebesar 101% dimana angka realisasi tersebut melebihi Target RPJMD Tahun 2020 yakni sebesar 34,10Kg/Kapita/Org atau sebesar 97,43%. Pada tahun 2021 capaian kinerja sebesar 34,78 Kg/Kapita/Org atau sebesar 99,37% dengan capaian Indikator Kinerja sebesar 101,49% dimana angka realisasi tersebut melebihi Target RPJMD Tahun 2020 yakni sebesar 34,27 Kg/Kapita/Org atau sebesar 97,91%. Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Ende pada tahun 2019, 2020 dan 2021 terus menerus mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah mulai memahami tentang manfaat dan pentingnya mengkonsumsi ikan. Dalam meningkatkan konsumsi ikan perlu tersedianya infrastusktur yang sangat penting dalam menciptakan rantai pasokan ikan yang efektif dan efisien. Sehingga ketersediaan komoditas ikan yang berkualitas bagi konsumen juga akan lebih terjamin. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi program dan kegiatan yang berkelanjutan guna mencapai target pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan.

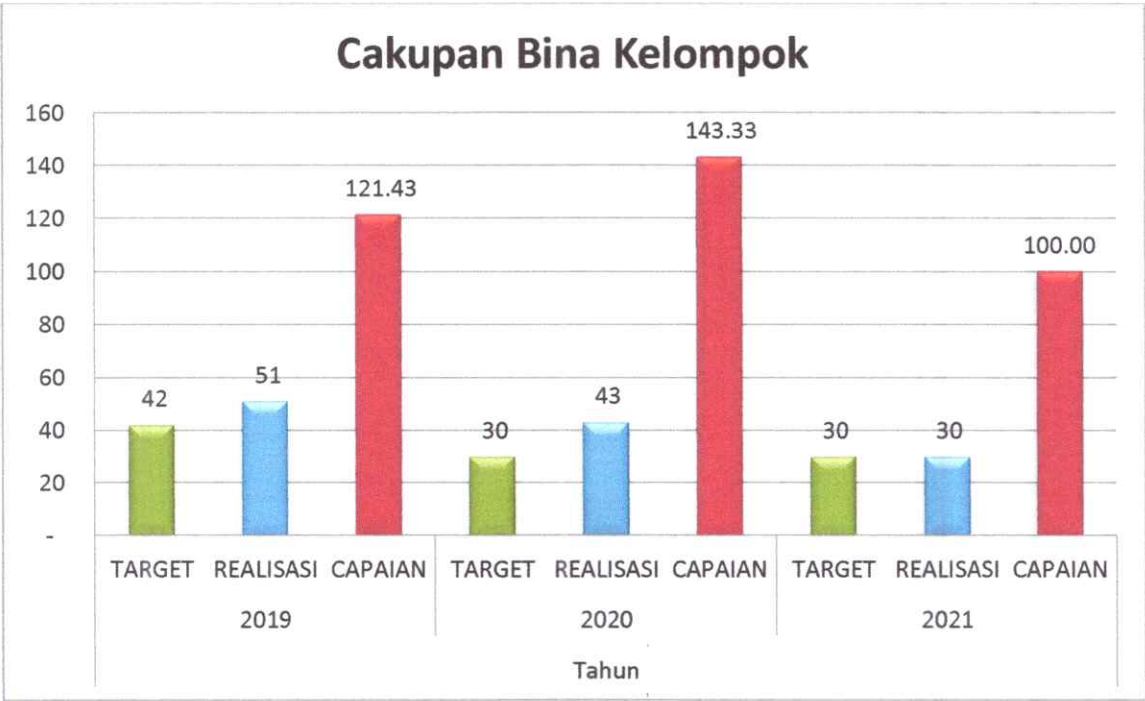
c. **Meningkatnya Produksi Garam**



Gambar 2.4. Trend Produksi Garam 2019-2021

Jumlah Produksi Garam Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 111,32 % dengan luas lahan garam sebesar 51,6 Ha dari target RPJMD yang ingin di capai pada tahun 2020 sebesar 24 %, dengan capaian indikatornya sebesar 463,85% sehingga mempengaruhi tingkat capaian indicator yang lebih besar dari target RPJMD untuk tahun 2020 sebesar 24%. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah produksi garam sebesar 225, 73 ton dengan target sebesar 115 ton dan capaian indikator mencapai 196,29 %. Pada tahun 2019 tidak adanya Jumlah produksi garam. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah produksi garam mengalami penurunan sebesar 52, 58 ton atau sebesar 18,9 %. Hal ini dikarenakan tidak ada alokasi anggaran untuk kegiatan pengembangan usaha garam. Selain itu harga jual yang cukup rendah berdampak pada aktifitas pengembangan usaha garam.

d. **Cakupan Bina Kelompok Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah serta Pemasar Hasil Perikanan**



Gambar 2.5. Grafik Trend Cakupan Bina Kelompok

Gambar diatas menunjukan bahwa capaian kinerja cakupan pembinaan dan pendampingan pada kelompok nelayan, pembudidaya dan poklahsar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dimana pada Tahun 2019 telah dilaksanakan pembinaan sebanyak 51 kelompok nelayan dari target yang ditetapkan sebanyak 42 kelompok atau prosentase realisasinya sebesar 121,43% pada dasarnya melebihi target yang di tetapkan pada Tahun 2019 dari Target capaian indikator RPJMD TA. 2019 Pada tahun 2020 jumlah kelompok yang telah dilakukan pembinaan sebanyak 43 kelompok binaan yang terdiri dari 30 kelompok nelayan, 9 kelompok budidaya dan 4 kelompok pengolah/pemasar) atau prosentase realisasinya sebesar 143,33% pada dasarnya melebihi target yang di tetapkan pada Tahun 2020 dari Target capaian indikator RPJMD TA. 2020 yang ingin dicapai sebanyak 30 kelompok. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah kelompok yang telah dilakukan pembinaan sebanyak 30 kelompok binaan yang terdiri dari 20 kelompok nelayan dan 10 kelompok budidaya atau prosentase realisasinya sebesar 100 % sama dengan target yang di tetapkan pada Tahun 2020 dari Target capaian indikator RPJMD TA. 2020 yang ingin dicapai sebanyak 30 kelompok atau sebesar 100 %. Peningkatan prosentase intensitas pembinaan dan pendampingan pada kelompok nelayan dan pembudidaya ikan, serta peningkatan prosentase cakupan bina kelompok nelayan tiap tahunnya dapat meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan produktivitas hasil perikanan.

e. Prosentase Peningkatan Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PAD

Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PAD mengalami penurunan pada Tahun 2020 dan 2021. Dimana penerimaan PAD pada Tahun 2020 hanya sebesar Rp. 42.653.000,- dibandingkan tahun sebelumnya. sedangkan pada tahun 2021 penerimaan PAD sebesar Rp 63.762.004,75.

Pencapaian kinerja pelayanan keseluruhan program pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Ende dalam mendukung RPJMD 2019-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel.2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kab. Ende Tahun 2019-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Tahun Ke-		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Meningkatnya Produksi Ikan				9.363,70	10.300	11.330	9.290,95	9.458	9.551,509	99,22	91,82	84,30
2	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi Ikan				32,76	34	34	34,14	34	34,78	104,21	101	101,49
3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah serta Pemasar Hasil Perikanan				42	30	30	51	43	30	121,43	143,33	100
4	Produksi Garam				-	60	115	-	278,31	225,73	-	463,85	196,29
5	Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PAD				830.160.000	130.000.000	90.000.000	50.400.000	42.653.000	63.762.004,75	6.07	32,81	70,85

f. Sumber Pembiayaan

Dalam Kurun Waktu Tahun 2019 – 2021, Dinas Perikanan mendapat Sumber Pembiayaan dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung tugas dan fungsi pokoknya dengan rincian sebagai berikut:

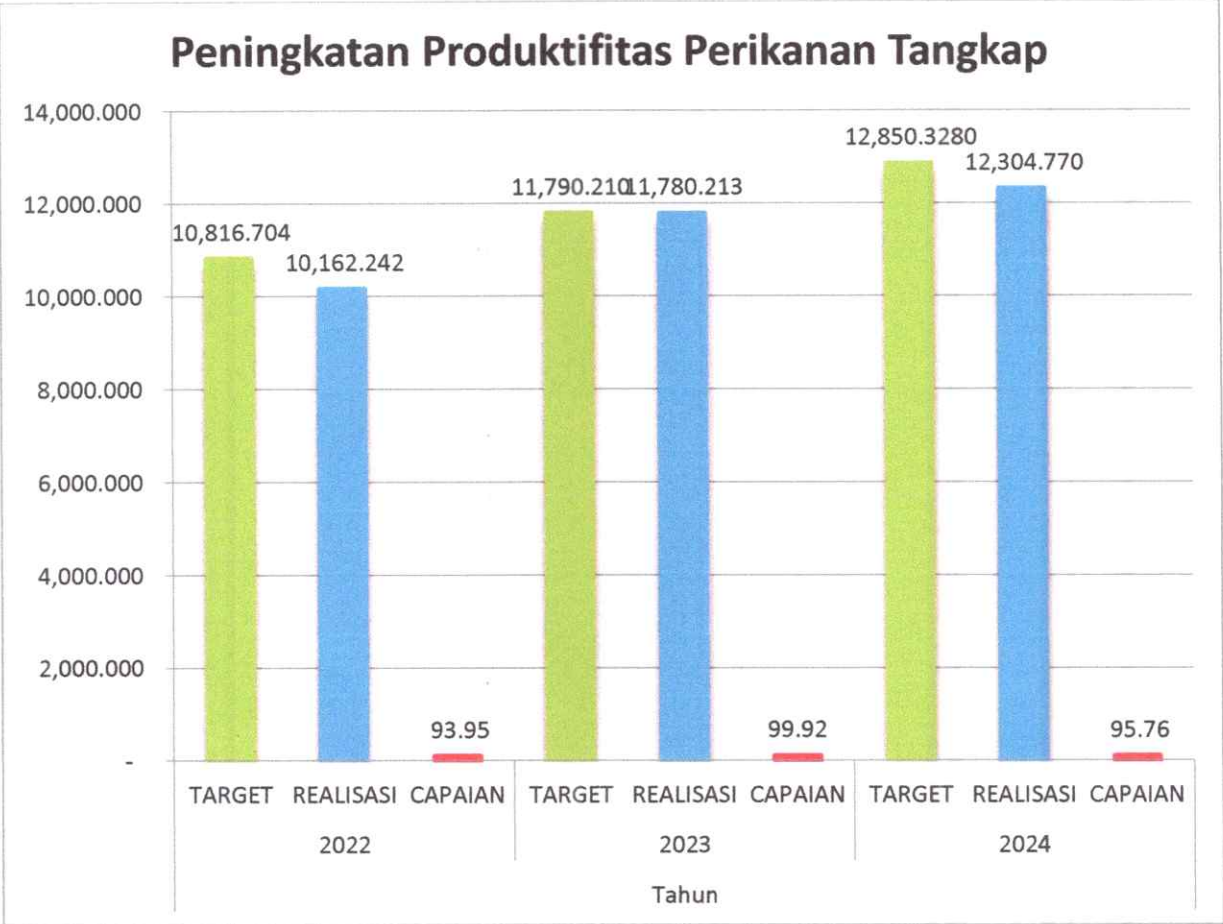
Tabel 2.8 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kab. Ende Tahun 2019-2021

Uraian	Anggaran pada tahun ke-			Realisasi Anggaran pada tahun ke-			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)			Rata-rata pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total Pendapatan	830.160.000,00	130.000.000,00	90.000.000,00	50.400.000,00	42.653.000,00	63.762.004,75	6,07	32,81	70,85	(246.720.000,00)	(4.454.001,58)
Pendapatan Daerah	830.160.000,00	130.000.000,00	90.000.000,00	50.400.000,00	42.653.000,00	63.762.004,75	6,07	32,81	70,85	(246.720.000,00)	(4.454.001,58)
Belanja Daerah	11.719.585.362,00	10.395.068.550,00	10.174.982.671,00	11.318.378.710,00	10.216.134.525,00	9.779.842.438,00	96,58	98,28	96,12	(514.867.563,67)	512.845.424,00
Belanja Tidak Langsung	2.153.179.362,00	1.788.638.150,00	2.318.638.929,00	2.001.641.581,00	1.769.554.412,00	2.239.146.334,00	92,96	98,93	96,57	55.153.189,00	(79.168.251,00)
Belanja Pegawai	2.153.179.362,00	1.788.638.150,00	2.318.638.929,00	2.001.641.581,00	1.769.554.412,00	2.239.146.334,00	92,96	98,93	96,57	55.153.189,00	(79.168.251,00)
Belanja Langsung	9.566.406.000,00	8.606.430.400,00	7.856.343.742,00	9.316.737.129,00	8.446.580.113,00	7.540.696.104,00	97,39	98,14	95,98	(570.020.752,67)	592.013.675,00
Belanja Pegawai	381.175.000,00	446.750.000,00	-	372.525.000,00	445.650.000,00	-	97,73	99,75	-	(127.058.333,33)	124.175.000,00
Belanja Barang & Jasa	8.735.876.000,00	7.712.930.400,00	1.609.838.832,00	8.533.887.129,00	7.555.280.113,00	1.375.326.422,00	97,69	97,96	85,43	(2.375.345.722,67)	2.386.186.902,33
Belanja Hibah	381.175.000,00	446.750.000,00	5.819.900.000,00	372.525.000,00	445.650.000,00	5.747.541.500,00	97,73	99,75	98,76	1.812.908.333,33	(1.791.672.166,67)
Belanja Modal	68.180.000,00	-	426.604.910,00	37.800.000,00	-	417.828.182,00	55,44	-	97,94	119.474.970,00	(126.676.060,67)
Total	(10.889.425.362,00)	(10.265.068.550,00)	(10.084.982.671,00)	(11.267.978.710,00)	(10.173.481.525,00)	(9.716.080.433,25)					

Data diatas menunjukan bahwa kebijakan alokasi APBD sangat mendukung pelayanan pada Dinas Perikanan. Alokasi APBD tahun 2019 adalah sebesar Rp. 9.566.406.000,- dan mengalami penurunan sebesar Rp. 8.606.430.400,- atau 10,03% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 terjadi penurunan alokasi anggaran dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 7.856.343.742,- atau turun sebesar 8,72%.

Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan didasarkan pada Perubahan Renstra 2019-2024 (Tahun 2022-2024) adalah sebagai berikut :

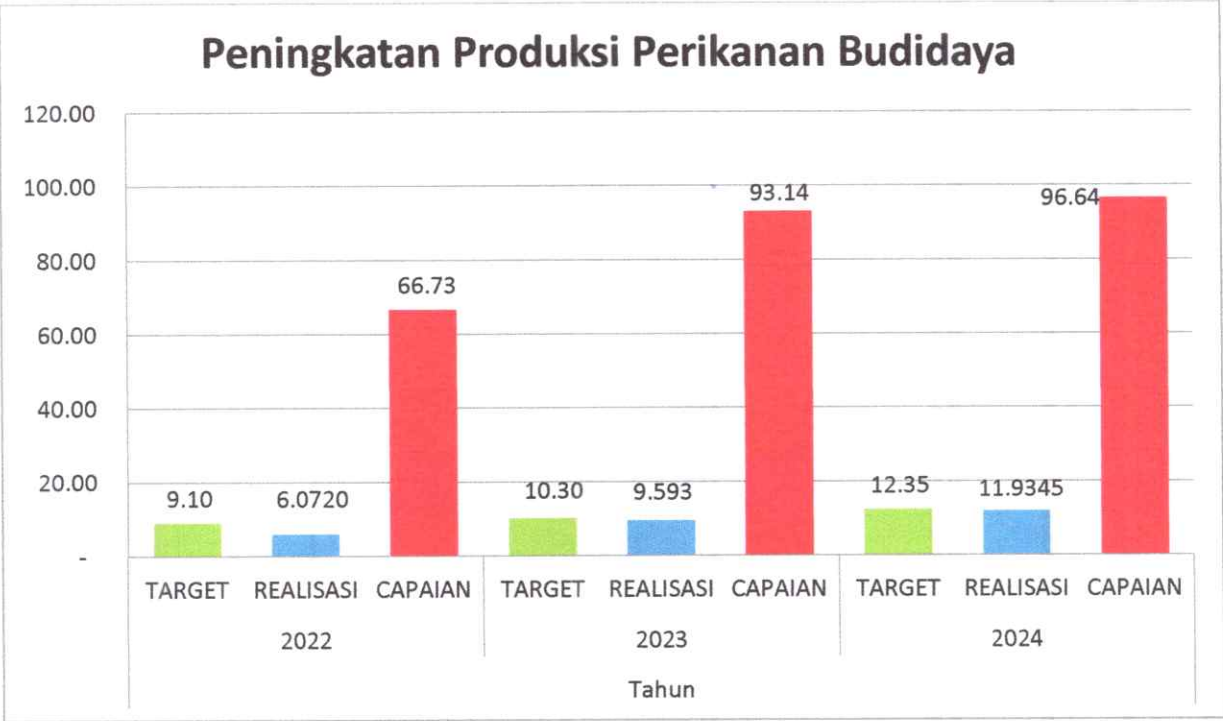
a. **Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap**



Gambar di atas menunjukan bahwa capaian kinerja peningkatan produktifitas perikanan tangkap tahun 2022 produksi perikanan mencapai 10162,242 Ton (93,95%) dari yang ditargetkan sebesar 10816,704 Ton, produksi tahun 2023 mencapai 11780,213 Ton (99,92%) dari target produksi 11790,210 Ton, hal ini disebabkan pada tahun 2022 produksi perikanan tangkap mengalami penurunan produksi karena adanya perubahan cuaca ekstrem yang terjadi selama tahun 2022 dimana terjadinya badai angin dan gelombang pasang serta arus laut yang kuat dan kenaikan permukaan air laut yang tinggi yang menyebabkan sebagian waktu dan aktifitas kegiatan penangkapan ikan tidak dapat dimanfaatkan oleh para nelayan sehingga berpengaruh terhadap produksi dan produktifitas hasil tangkapan ikan dan pada tahun 2023 produksi perikanan tangkap mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dikarenakan bertambahnya sarana dan prasarana perikanan dan adanya pelatihan dan pendampingan

terhadap kelompok usaha pelaku perikanan serta pemanfaatan sarana dan prasarana sudah efektif sehingga berpengaruh terhadap produksi dan produktifitas hasil tangkapan ikan dan untuk produksi ikan tahun 2024 sebesar 12304,77 ton (95,76%) dari target produksi yakni yang ditargetkan sebesar 12850,328 ton mengalami penurunan produksi disebabkan Selama Periode Tahun 2024 sering terjadi perubahan cuaca dan musim pancaroba dimana terjadinya gelombang pasang dan angin kencang sehingga menyebabkan nelayan mengalami kesulitan melaut yang mengakibatkan penurunan hasil tangkapan Selain itu SDM Nelayan hanya mampu mengoperasikan sarana penangkapan berukuran kecil, dan terbatas serta minimnya kegiatan pelatihan teknis penangkapan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam meningkatkan Produktivitas hasil tangkapan ini, dengan melalui penambahan jumlah Sarana dan Penangkapan ikan yang didistribusikan kepada kelompok masyarakat Nelayan dalam upaya meningkatkan produktivitas perikanan, serta pelatihan teknis dalam meningkatkan sumber daya manusia pada kelompok nelayan baik dalam pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penangkapan ikan.

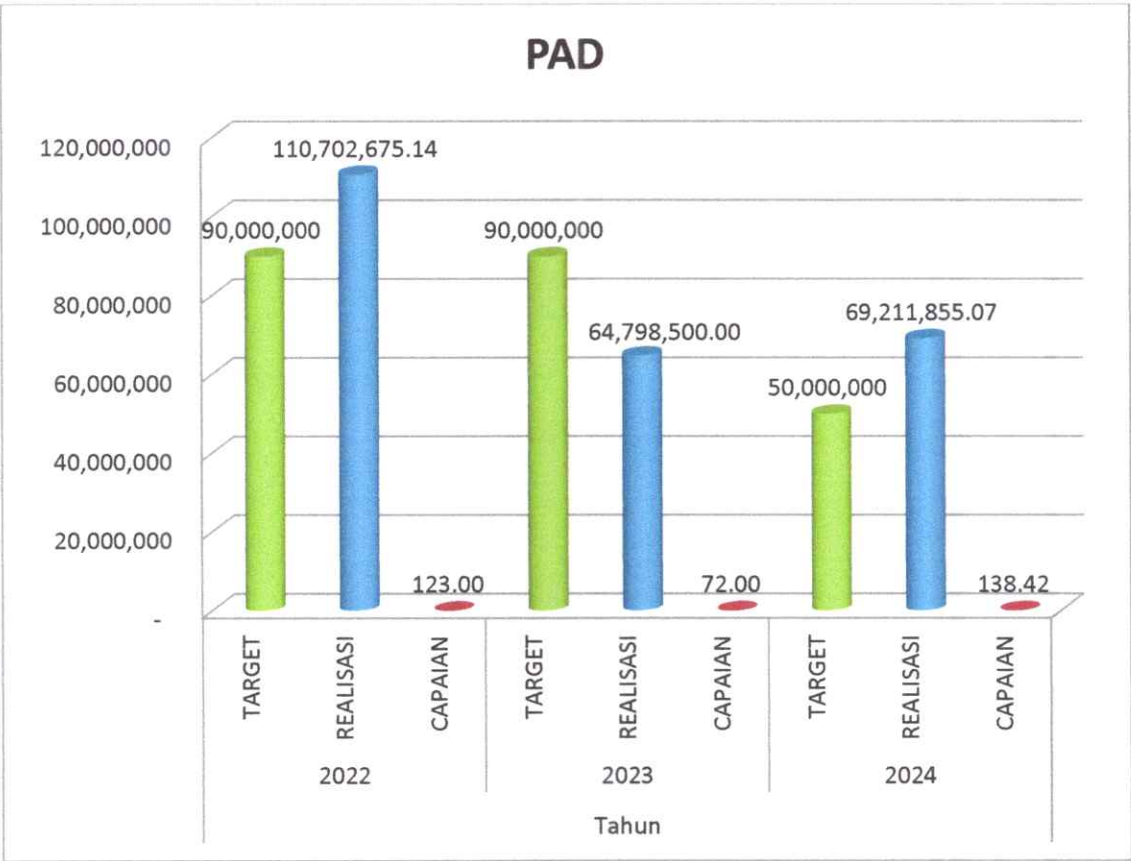
b. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya



Gambar di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja peningkatan produksi perikanan budidaya tahun 2022 produksi perikanan mencapai 6,0720 Ton (66,37%) dari yang ditargetkan sebesar 9,10 Ton, produksi tahun 2023 mencapai 9,593 Ton (93,14%) dari target produksi 10,30 Ton, hal ini disebabkan pada tahun 2022 produksi perikanan budidaya mengalami penurunan produksi karena adanya Perubahan Kualitas air yang disebabkan curah hujan tinggi yang mengakibatkan tingginya mortalitas pada saat proses budidaya, Perubahan Kualitas air yang disebabkan curah hujan tinggi yang mengakibatkan tingginya mortalitas pada saat proses budidaya, Naiknya Harga Pakan Ikan sehingga Ketersedian pakan tidak mencukupi di pembudidaya dan Sebagian besar SDM

Pembudidaya masih sangat terbatas dan pada tahun 2023 dan 2024 mengalami peningkatan produksi disebabkan karena pakannya cukup untuk diberikan pada ikan pembesaran dan kelompok sudah dibekali dengan pelatihan pembuatan pakan mandiri maka produksi ikan budidaya sedikit meningkat pada tahun 2024

c. **Prosentase Peningkatan Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PAD**



Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PAD mengalami kenaikan pada Tahun 2022 karena adanya penyeteran dari sumber pabrik es dan SPBU Nelayan sebesar Rp. 110.702.675,14 (123%) dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 90.000.000,- dan untuk tahun 2023 realisasi PAD sebesar Rp. 64.798.500,- (72%) dari target PAD yang ditetapkan sebesar Rp. 90.000.000,- hal ini disebabkan karena pabrik es yang merupakan sumber PAD tidak dapat beroperasi karena adanya kerusakan pabrik es, yang mana tahun 2023 penyeteran hanya pada SPBU Nelayan. Penerimaan PAD pada Tahun 2024 sebesar Rp. 69.211,855,07,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000,- yang bersumber dari SPBU Nelayan.

Tabel 2.9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kab. Ende Tahun 2022-2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Perubahan Renstra PD Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Tahun Ke-		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap				10.816,704	11.790,210	12.850,328	10.162,242	11.780,213	12.304,770	93,95	99,92	95,76
2	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya				9,10	10,30	12,35	6,0720	9,593	11,9345	66,73	93,14	96,64
3	Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PAD				90.000.000	90.000.000	50.000.000	110.702.675,14	64.798.500	69.211.855,07	123	72	138,42

d. Sumber Pembiayaan

Dalam Kurun Waktu Tahun 2022 – 2024, Dinas Perikanan mendapat Sumber Pembiayaan dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung tugas dan fungsi pokoknya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.10 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kab. Ende Tahun 2022-2024

Uraian	Anggaran pada tahun ke-			Realisasi Anggaran pada tahun ke-			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)			Rata-rata pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	14	15
Total Pendapatan	90,000,000.00	90,000,000.00	50,000,000.00	110,702,675.14	64,798,500.00	69,211,855.07	123.00	72.00	138.42	76,666,666.67	81,571,010.07
Pendapatan Daerah	90,000,000.00	90,000,000.00	50,000,000.00	110,702,675.14	64,798,500.00	69,211,855.07	123.00	72.00	138.42	76,666,666.67	81,571,010.07
Belanja	9,482,144,315.00	14,076,198,970.00	5,604,011,874.00	8,713,883,079.00	13,900,405,002.00	5,507,940,228.00	91.90	98.75	98.29	9,720,785,053.00	9,374,076,103.00
Belanja Operasional	9,275,434,315.00	14,076,198,970.00	5,578,011,874.00	8,507,529,079.00	13,900,405,002.00	5,507,940,228.00	91.72	98.75	98.74	9,643,215,053.00	9,305,291,436.33
Belanja Pegawai	2,428,934,693.00	2,128,948,970.00	2,335,064,373.00	2,335,214,958.00	2,104,867,234.00	2,332,957,039.00	96.14	98.87	99.91	2,297,649,345.33	2,257,679,743.67
Belanja Barang & Jasa	1,763,804,622.00	7,062,100,000.00	3,242,947,501.00	1,629,039,121.00	6,968,982,768.00	3,174,983,189.00	92.36	98.68	97.90	4,022,950,707.67	3,924,335,026.00
Belanja Hibah	5,082,695,000.00	4,885,150,000.00	-	4,543,275,000.00	4,826,555,000.00	-	89.39	98.80	-	3,322,615,000.00	3,123,276,666.67
Belanja Modal	206,710,000.00	-	26,000,000.00	206,354,000.00	-	-	99.83	-	-	77,570,000.00	68,784,666.67
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,710,000.00	-	26,000,000.00	6,700,000.00	-	-	99.85			10,903,333.33	2,233,333.33
Belanja Modal Jalan, Jaringan & Irigasi	200,000,000.00	-	-	199,654,000.00	-	-	99.83			66,666,666.67	66,551,333.33
Total	(9,392,144,315.00)	(13,986,198,970.00)	(5,554,011,874.00)	(8,603,180,403.86)	(13,835,606,502.00)	(5,438,728,372.93)	91.60	98.92	97.92		

e. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Kabupaten Ende merupakan salah satu Kabupaten di wilayah NTT yang memiliki Potensi sumberdaya alam sektor kelautan dan perikanan yang cukup menjanjikan untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini cukup beralasan karena secara geografis Kabupaten Ende berada 2 wilayah perairan laut yaitu wilayah Perairan Utara (Laut Flores) dan Perairan Selatan (Laut Sabu) dengan Panjang Garis Pantai 205.572 Km². Potensi lestari perikanan (*Maximum Sustainable Yield* /MSY) yang terkandung didalamnya mencapai $\pm 19.299,4$ ton/tahun dan baru dimanfaatkan 12.304.77 ton di tahun 2024

Sektor kelautan dan perikanan mampu memberikan kontribusi besar dalam pembangunan daerah. Karakteristik perairan merupakan aset strategis yang dapat didayagunakan bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan karakteristik wilayah lingkungan strategis, terdapat sejumlah tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Ende.

Ruang Lingkup pengembangan pelayanan telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 35 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Ende dengan bidang pelayanan meliputi:

- Bidang Pengembangan Perikanan Tangkap;
- Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perikanan;
- Bidang Pengembangan Perikanan Budidaya; dan
- Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Kecil Perikanan.

Tantangan dan peluang Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

- 1) Tantangan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan di Kab.Ende.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Ende ialah :

- a. Rendahnya kapasitas SDM Aparatur pada Dinas Perikanan serta SDM Masyarakat Perikanan (Nelayan, Pembudidaya, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan); termasuk kelembagaan kelompok masyarakat perikanan dan IPTEK);
- b. Belum Optimalnya sarana dan Prasarana produksi Perikanan dan pemasaran hasil produk olahan ikan;

- c. Rendahnya akses masyarakat terhadap sumber permodalan usaha serta pengetahuan tentang manajemen usaha;
 - d. Musim yang tidak menentu/perubahan cuaca yang tidak merata sehingga nelayan kecil dengan armada kecil tidak bisa melaut
 - e. Belum adanya penerapan metode CBIB dan CPIB;
 - f. Belum adanya Tempat Pelelangan Ikan (TPI dan Balai Benih Ikan (BBI));
 - g. Masih adanya aktivitas ilegal fishing yang menyebabkan kerusakan ekosistem serta berdampak pada penurunan produktivitas hasil Perikanan tangkap dan Budidaya.
- 2) Peluang Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Ende. Peluang yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan pada masa yang akan datang :
- a. Adanya potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Potensi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya) dimiliki yang belum di manfaatkan secara optimal ;
 - b. Meningkatnya kebutuhan masyarakat lokal akan konsumsi ikan dan bahan baku ikan untuk produk olahan hasil perikanan;
 - c. Adanya dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan perikanan dan kelautan
 - d. Tingginya keinginan masyarakat dalam usaha budidaya ikan;
 - e. Adanya dukungan anggaran untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan bidang Perikanan dari Pemerintah Daerah guna mendukung 12 program prioritas pembangunan daerah;
 - f. Adanya dukungan Program dan Kegiatan/anggaran yang bersumber dari pemerintah propinsi NTT (APBD I) melalui cabang dinas kelautan dan perikanan Prop. NTT wilayah kabupaten Ende, Kabupaten Ngada dan kabupaten Nagekeo;

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Perikanan Kabupaten Ende adalah masyarakat pembudidaya ikan baik yang sudah bergabung dalam POKDAKAN (Kelompok Pembudidaya Ikan) maupun belum, masyarakat nelayan baik yang sudah bergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) maupun yang belum serta pengolah dan pemasar hasil perikanan Kabupaten Ende baik yang sudah bergabung dalam kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (POKLAHSAR) maupun yang belum.

2.2.1 Pemasalahan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti pada uraian tersebut di atas permasalahan yang teridentifikasi di lingkup Dinas Perikanan sebagai organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap Yang Inovatif, Produktif, Lestari dan Berkelanjutan;	1. Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap masih Terbatas seperti ketersediaan BBM tidak merata untuk nelayan pergi melaut dan Ketersediaan es untuk pendinginan ikan hasil tangapan masih terbatas; 2. Kualitas SDM nelayan rata-rata masih rendah; 3. Keterbatasan Penyuluh lapangan di bidang perikanan; 4. Akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan tangkap terbatas; 5. Kemampuan sebagian besar armada perikanan tangkap di daerah hanya dapat beroperasi di perairan pantai, karena skalanya yang relative kecil; 6. Pengolahan data potensi perikanan tangkap belum optimal; 7. Belum adanya Tempat Pelelangan Ikan, SPBU Nelayan dan Pabrik Es
		2. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya Yang Inovatif, Produktif, Lestari dan Berkelanjutan;	1. Belum dikuasainya teknologi pembenihan dan pembesaran beberapa komoditas Ikan; 2. Masih terjadinya abrasi di sepanjang garis pantai daerah; 3. Sarana produksi dan produktivitas usaha budidaya relative rendah; 4. Masih lemahnya kelembagaan kelompok; 5. Pengolahan data potensi perikanan budidaya belum optimal.

		3. Masalah eksternal dalam pengembangan bidang kelautan dan perikanan;	1. Belum mantapnya tata ruang lahan untuk perikanan budidaya; 2. Masih lemahnya dukungan perbankan bagi usaha perikanan budidaya; 3. Mekanisme penyuluh belum berjalan secara baik serta belum adanya tenaga penyuluh perikanan 4. Kawasan budidaya masih tradisional; 5. Masih terbatasnya ketersediaan benih ikan unggul untuk pembudidayaan ikan; 6. Kualitas SDM pembudidayaan ikan rata-rata masih rendah dan keterbatasan SDM pembangunan bidang perikanan terutama bidang perikanan budidaya.
		4. Belum Optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan dan jaminan keamanan mutu.	1. Kualitas/mutu produk perikanan saat penanganan dan pengolahan masih rendah; 2. Masih rendahnya pertumbuhan pelau usaha kelautan dan perikanan serta kurangnya diversifikasi produk olahan hasil perikanan; 3. Sistem logistic ikan belum tertata dengan baik; 4. Belum berkembangnya teknologi pengolahan/pengawetan ikan sebagai bentuk keanekaragaman dalam memenuhi tuntutan selera konsumen; 5. Pengelolaan data potensi perikanan pengolahan dan pemasaran belum optimal; 6. Produk perikanan banyak yang belum terpantau distribusi dan pemasarannya.

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perikanan Kab. Ende sbb :

1. Rendahnya kualitas SDM nelayan dan pembudidaya dalam penguasaan teknologi;
2. Pengelolaan sumber daya perikanan belum optimal dibandingkan ketersediaan potensi lestarnya karena terbatasnya kapasitas dan jumlah armada penangkapan serta peralatan tangkap dalam peningkatan produksi hasil tangkapan;
3. Pengolahan data potensi perikanan belum optimal;
4. Pengembangan usaha budidaya masih bersifat spasial, belum menerapkan konsep usaha kawasan sehingga sangat menyulitkan dalam pembinaan dan pengawasan;
5. Produksi usaha budidaya masih berorientasi pada penyediaan bibit ikan untuk pemasaran lokal, belum berorientasi pada pemasaran untuk konsumsi masyarakat;
6. belum adanya sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Balai Benih Ikan (BBI);
7. Akses pasar yang terbatas dan tidak ada industri pengolahan;
8. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan, seperti armada penangkapan, peralatan tangkap dan cold storage.

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat dalam Tabel 2.4.2 Teknik Menyimpulkan Isu Perangkat Daerah sebagaimana berikut:

Tabel 2.2.2 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	• Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap Yang Inovatif, Produktif, Lestari dan Berkelanjutan ; • Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya Yang Inovatif, Produktif, Lestari dan Berkelanjutan; • Masalah eksternal dalam pengembangan bidang kelautan dan perikanan; • Belum Optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui	• Banyak nelayan hidup dalam kemiskinan dengan pendapatan yang rendah dan kondisi kerja yang buruk • Terjadi persaingan antar nelayan, baik lokal maupun dengan nelayan luar daerah, yang dapat menyebabkan konflik • Keterbatasan data dan penelitian tentang stok ikan dan kondisi lingkungan laut dapat menyulitkan pengelolaan yang berkelanjutan • Keterbatasan dalam penerapan teknologi yang berdampak pada rendahnya hasil produksi • Nelayan dan pembudidaya seringkali kesulitan mendapatkan akses ke	• Illegal & over fishing • Kerusakan Lingkungan akibat penggunaan obat, bahan peledak dan alat tangkap yang tidak sesuai • Perubahan iklim	• Illegal & over fishing • Kerusakan Lingkungan akibat penggunaan obat, bahan peledak dan alat tangkap yang tidak sesuai • Perubahan iklim • Akses pemodalan	• Keterbatasan kewenangan • Rendahnya akses permodalan, • Rendahnya keterampilan dalam penerapan teknologi dan akses informasi • Perubahan iklim	• Rendahnya kualitas SDM Nelayan dan pembudidaya dalam penguasaan teknologi • Pengelolaan sumber daya perikanan belum optimal dibandingkan dengan ketersediaan potensi lestari karena terbatasnya kapasitas dan jumlah armada penangkapan serta peralatan tangkap dalam peningkatan produksi hasil tangkapan

	pengolahan hasil perikanan dan jaminan keamanan mutu.	modal, teknologi, informasi, dan pasar yang adil. • Banyak nelayan, pembudidaya, dan pengolah serta pemasar hasil perikanan tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk mengelola usaha perikanan mereka secara efektif atau beradaptasi dengan perubahan teknologi • Sistem penanganan pasca panen yang buruk dapat menyebabkan penurunan kualitas ikan dan kerugian ekonomi • Nelayan dan pembudidaya seringkali kesulitan memasarkan hasil produksi dengan harga yang layak • Rantai pasok yang panjang dan tidak efisien dapat menyebabkan harga jual ikan menjadi lebih tinggi dan mengurangi keuntungan nelayan;				• Pengelolaan data potensi perikanan belum optimal • Pengembangan usaha budidaya masih bersifat parsial, belum menerapkan konsep usaha kawasan sehingga sangat menyulitkan dalam pembinaan dan pengawasan • Produksi usaha budidaya masih berorientasi pada penyediaan bibit ikan untuk pemasaran lokal, belum berorientasi pada pemasaran untuk konsumsi masyarakat • Belum adanya sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan
--	--	---	--	--	--	--

		• Kebijakan perikanan yang ada seringkali tidak efektif dalam mengatasi permasalahan yang ada, seperti penegakan hukum yang lemah terhadap penggunaan obat, illegal fishing dll				(TPI) dan Balai Benih Ikan (BBI) • Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan, seperti armada penangkapan, peralatan tangkap dan cold storage; • Akses pasar yang terbatas dan tidak ada industri pengolahan
--	--	---	--	--	--	---

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

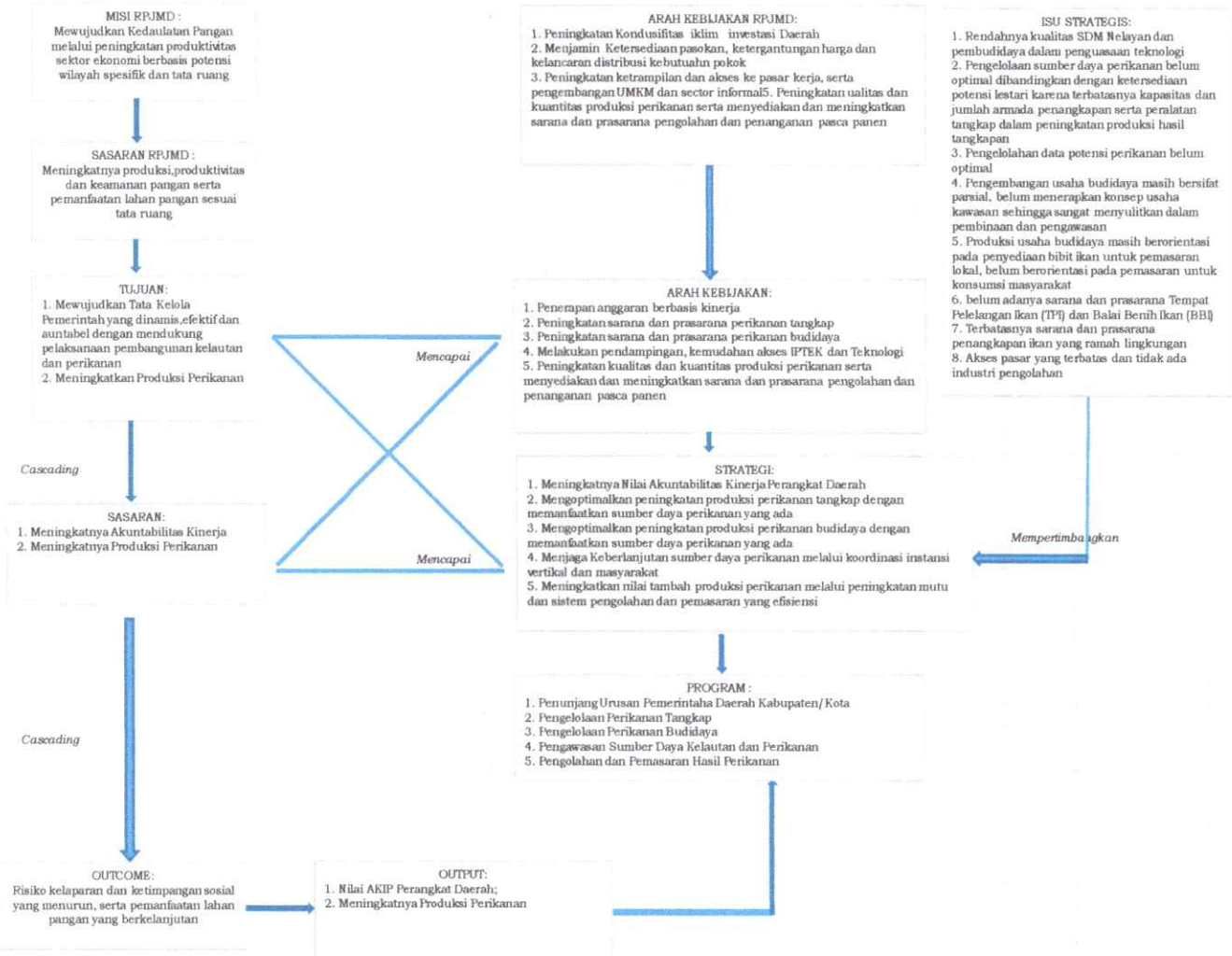
3.1 Tujuan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2025-2029

Visi Bupati Wakil Bupati Ende Tahun 2025-2029 adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN ENDE YANG MAJU, BERDAYA SAING,DAN BERKELANJUTAN BERBASISKAN IMAN DAN BUDAYA ENDE LIO NAGE SARE PAWE “** dan Dinas Perikanan mendukung dengan Misi VI RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025-2029, yaitu: “Mewujudkan Kedaulatan Pangan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Ekonomi Berbasis Potensi Wilayah Spesifik dan Tata Ruang”.

Dinas Perikanan menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : **Meningkatnya produktivitas perikanan**, dengan indikator tujuan **Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB**.

Tujuan tersebut diarahkan untuk mengimplementasikan sasaran RPJMD yaitu : **“Meningkatnya produksi, produktivitas dan keamanan pangan serta pemanfaatan pangan sesuai tata ruang”**. Konsep penyusunan renstra Dinas Perikanan Kabupaten Ende 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah



3.2 Sasaran Renstra Dinas Perikanan Tahun 2025-2029

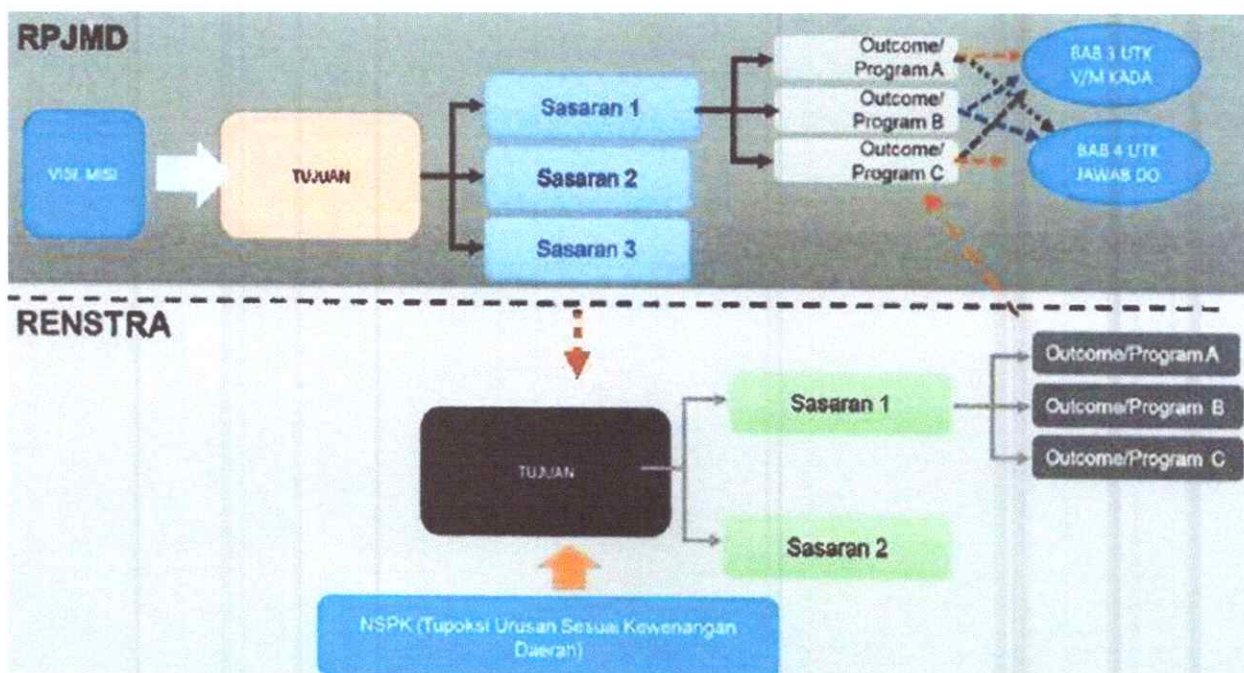
Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

1. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
2. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah
3. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Dari tujuan di atas ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja
2. Meningkatnya produksi perikanan tangkap
3. Meningkatnya produksi perikanan budidaya
4. Meningkatnya angka konsumsi ikan
5. Meningkatnya Persentase Kepatuhan terhadap Peraturan di Bidang Perikanan

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Produksi, produktivitas dan keamanan pangan serta pemanfaatan pangan sesuai tata ruang	Meningkatnya Produktivitas Perikanan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	B Predikat	B Predikat	B Predikat	B Predikat	B Predikat	B Predikat	
		Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan (Ton)	12686,2	13066,8	13459	13862,56	14278,44	14707	

Rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Dinas Perikanan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2. Mengoptimalkan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dengan memanfaatkan Sumber Daya Perikanan yang ada;
3. Mengoptimalkan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dengan memanfaatkan Sumber Daya Perikanan yang ada;
4. Menjaga Kerberlanjutan Sumber Daya Perikanan melalui koordinasi instansi vertikal dan masyarakat;
5. Meningkatkan Nilai Tambah Produksi Perikanan melalui Peningkatan Mutu dan Sistem Pengolahan dan Pemasaran yang efisien.

3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perikanan Tahun 2025-2029

Strategi adalah lanhkah-langkah yang berisikan program prioritas Pembanguann untuk pencapaian sasaran. Dalam pelaksanaan strategi dipergunakan untuk mempermudah, mengefisienkan serta mengefektifitaskan pencapaian tujuan.

Strategi Dinas Perikanan Kabupaten Ende dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran	Strategi
1. Meningkatnya Produktivitas Perikanan.	1. Meningkatnya Akuntabel Kinerja;	1) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
	2. Meningkatnya Produksi Perikanan.	2) Mengoptimalkan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dengan memanfaatkan Sumber Daya Perikanan yang ada; 3) Mengoptimalkan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dengan memanfaatkan Sumber Daya Perikanan yang ada; 4) Menjaga Kerberlanjutan Sumber Daya Perikanan melalui koordinasi instansi vertical dan masyarakat; 5) Meningkatkan Nilai Tambah Produksi Perikanan melalui Peningkatan Mutu dan Sistem Pengolahan dan Pemasaran yang efisien

Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.4 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I Tahun 2026	Tahap II Tahun 2027	Tahap III Tahun 2028	Tahap IV Tahun 2029	Tahap V Tahun 2030
IV. ENDE PRODUKTIF : <i>Membangun abupaten Ende melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, UMKM Pemberdayaan Masyarakat dengan Optimalisasi SDA</i>				
Pemetaan Potensi & Konsolidasi SDM	Penguatan Infrastruktur dan Akses Produksi	Pengolahan, Hilirisasi dan Akses Pasar	Inovasi Teknologi & Digitalisasi Usaha Rakyat	Keberlanjutan, Evaluasi & Replikasi Modal Usaha
Fokus : Identifikasi Potensi wilayah & penguatan kapasitas dasar masyarakat	Fokus : Penyediaan sarana produksi & peningkatan kapasitas teknis	Fokus : Nilai Tambah Hasil Produksi & Perluasan Akses Pasar	Fokus : Modernisasi usaha rakyat melalui teknologi & digitalisasi	Fokus : Evaluasi Program & pembangunan system ekonomi lestari
• Pemetaan komoditas unggulan sektor: perikanan • Pendataan nelayan, dan kelompok nelayan • Pelatihan dasar produktivitas & kewirausahaan nelayan dan pembudidaya • Identifikasi dan penilaian potensi SDA secara ekologis dan ekonomis • Pembentukan klaster usaha produktif berbasis wilayah	• Pembangunan/rehabilitasi sarana produksi: tambak dan dermaga nelayan • Bantuan alat dan mesin perikanan (cold storage, dll) • Pelatihan teknis: budidaya modern, pasca panen, pengolahan hasil perikanan • Pembentukan koperasi/kelompok usaha bersama (KUB) produktif	• Pengembangan unit pengolahan hasil (UPH) perikanan, • Sertifikasi produk perikanan (standar mutu) • Pelatihan pengemasan dan pemasaran produk unggulan lokal • Kolaborasi dengan BUMDes untuk pengelolaan hasil produksi • Promosi produk “Ende Produktif” melalui event, expo, dan platform digital	• Digitalisasi rantai pasok dan pemasaran produk melalui aplikasi lokal • Penerapan teknologi tepat guna: irigasi tetes, bioflok, pupuk organik, drone pertanian • Integrasi program dengan pendidikan vokasi dan pelatihan • Pembangunan Pusat Inovasi & Teknologi Sumber Daya Lokal	• Evaluasi dampak ekonomi dan ekologi dari program ENDE PRODUKTIF • Replikasi model klaster sukses ke wilayah lain • Penetapan kawasan pengembangan ekonomi berbasis SDA lestari • Integrasi kebijakan hulu-hilir: produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran • Penguatan regulasi dan kelembagaan pemberdayaan masyarakat berkelanjutan

3.4 Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perikanan Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Dinas Perikanan dapat dilihat pada table 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan Produktivitas Perikanan	Menjamin ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok	Penerapan anggaran berbasis kinerja	
			Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap	
			Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya	
			Melakukan pendampingan, kemudahan akses IPTEK dan Teknologi	
			Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi perikanan serta menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan dan penanganan pasca panen	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan **Renstra Perangkat Daerah**, salah satu bagian kunci adalah menyusun **program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan**. Hal Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

4.1
Uraian Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Dinas Perikanan dalam mendukung visi misi bupati dan wakil bupati ditentukanlah program 5 program , 8 kegiatan dan 55 Sub Kegiatan. Adapun program yang dimiliki Dinas Perikanan adalah sebagai berikut :

- a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.
- b. Pengelolaan Perikanan Tangkap
- c. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap merupakan program yang
- d. Pengelolaan Perikanan Budidaya
- e. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikan
- f. Pengolahan dan Pemasar Hasil Perikanan

4.2
Uraian Kegiatan

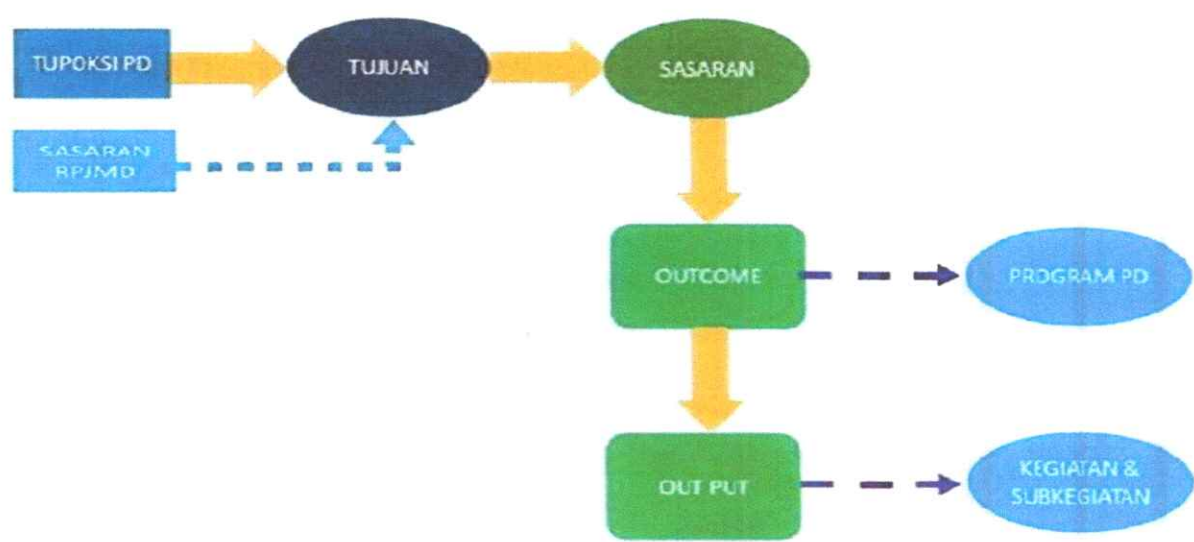
Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Ende adalah sebagai berikut :

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah
- 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Perikanan merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Dinas Perikanan juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Perikanan serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Perikanan dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Perikanan



Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Perikanan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Produksi, Produktifitas dan keamanan pangan serta pemanfaatan potensi wilayah dan tata ruang					Produksi Perikanan		
	Meningkatnya Produktivitas Perikanan				Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja			Nilai AKIP Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	
			Meningkatnya Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara Efektif dan Efisien selama 1 tahun		Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara Efektif dan Efisien selama 1 tahun		
				Meningkatnya Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Meningkatnya Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Produksi Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Pengelolaan Perikanan Tangkap	
				Meningkatnya Prosentase Kelompok Nelayan Yang Terjamin dan terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap	Prosentase Kelompok Nelayan Yang Terjamin dan terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
				Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
				Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (unit)	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
				Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
				Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
		Meningkatnya Produksi Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Pengelolaan Perikanan Budidaya	
				Meningkatnya Prosentase surat izin usaha bidang pembudidayaan ikan yang diterbitkan	Prosentase surat izin usaha bidang pembudidayaan ikan yang diterbitkan	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing (Rekomendasi)	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	
				Terlayannya Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Melalui Penerbitan Rekomendasi Teknis	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Budidaya	Cakupan Bina Kelompok Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
				Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
				Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
				Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
				Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
				Meningkatnya Persentase Kelompok Pembudidaya Yang Terjamin dan terpenuhi kebutuhan sarpras usaha perikanan budidaya	Persentase Kelompok Pembudidaya Yang Terjamin dan terpenuhi kebutuhan sarpras usaha perikanan budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
				Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
				Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Unit)	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
				Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	
				Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat bagi Pembudidaya Ikan	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit)	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	
				Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan (Dokumen)	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	
		Meningkatnya Produksi Perikanan	Meningkatnya Persentase Kepatuhan terhadap Peraturan di Bidang Perikanan		Persentase Kepatuhan terhadap Peraturan di Bidang Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
				Meningkatnya Persentase Masyarakat Pengawas perikanan yang dibina	Persentase Masyarakat Pengawas perikanan yang dibina	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota	
				Terawasinya pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/ kota (Pelaku Usaha)	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/ kota (Pelaku Usaha)	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/ kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terawasinya pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
				Terawasinya pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
		Meningkatnya Produksi Perikanan	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan		Angka Konsumsi Ikan	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
				Meningkatnya Persentase Poklhasar yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase Poklhasar yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
				Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	
				Meningkatnya Persentase unit usaha hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan	Persentase unit usaha hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
				Terlaksananya Pembinaan Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Persentase kelompok poklahsar yang terfasilitasi sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan	Persentase kelompok poklahsar yang terfasilitasi sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
				Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Ton)	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
				Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3 Rencana Program /Kegiatan /Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET (4)	PAGU (5)	TARGET (6)	PAGU (7)	TARGET (8)	PAGU (9)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan	12316.7 Ton	13066.8 Ton	12,400,000,000	13459 Ton	12,643,040,000	13862.56 Ton	12,997,045,120	14278.44 Ton	13,490,932,832	14707 Ton	13,922,642,680	
	Nilai AKIP Perangkat Daerah	64.95	65.25	3,100,000,000	65.75	3,160,760,000	65.95	3,249,261,280	66.15	3,372,733,208	67.10	3,480,660,670	
	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara Efektif dan Efisien selama 1 tahun	100%	100%	3,100,000,000	100%	3,160,760,000	100%	3,249,261,280	100%	3,372,733,208	100%	3,480,660,670	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	59,000,000	100%	60,180,000	100%	61,383,600	100%	78,611,272	100%	80,183,497	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	47,000,000	2 Dokumen	47,880,000	2 Dokumen	48,783,600	2 Dokumen	65,561,272	3 Dokumen	66,883,497	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,100,000	1 Dokumen	3,200,000	1 Dokumen	3,300,000	1 Dokumen	3,350,000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,100,000	1 Dokumen	3,200,000	1 Dokumen	3,300,000	1 Dokumen	3,350,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	17 Laporan	3,000,000	17 Laporan	3,050,000	17 Laporan	3,100,000	17 Laporan	3,300,000	17 Laporan	3,350,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3,000,000	3 Laporan	3,050,000	3 Laporan	3,100,000	3 Laporan	3,150,000	3 Laporan	3,250,000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	2,851,000,000	100%	2,906,780,000	100%	2,964,915,600	100%	3,051,213,912	100%	3,152,710,989	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	2,842,000,000	45 Orang/Bulan	2,897,480,000	45 Orang/Bulan	2,955,465,600	45 Orang/Bulan	3,041,613,912	45 Orang/Bulan	3,143,010,989	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	3,000,000	10 Dokumen	3,100,000	10 Dokumen	3,150,000	10 Dokumen	3,200,000	10 Dokumen	3,200,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	1 Laporan	3,100,000	1 Laporan	3,150,000	1 Laporan	3,200,000	1 Laporan	3,250,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	3,000,000	18 Laporan	3,100,000	18 Laporan	3,150,000	18 Laporan	3,200,000	18 Laporan	3,250,000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	5,000,000	100%	5,100,000	100%	5,202,000	100%	5,792,742	100%	5,908,597	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	17 Laporan	17 Laporan	5,000,000	17 Laporan	5,100,000	17 Laporan	5,202,000	17 Laporan	5,792,742	17 Laporan	5,908,597	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	50,000,000	100%	51,000,000	100%	57,306,080	100%	68,452,202	100%	69,821,246	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	30,000,000	1 Paket	30,000,000	1 Paket	36,000,000	1 Paket	42,146,202	1 Paket	43,515,246	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		1 Orang	20,000,000	1 Orang	21,000,000	1 Orang	21,306,080	1 Orang	26,306,000	1 Orang	26,306,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	15,000,000	100%	15,300,000	100%	15,606,000	100%	15,918,120	100%	16,236,482	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1,500,000	1 Paket	1,500,000	1 Paket	1,500,000	1 Paket	1,600,000	1 Paket	1,600,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1,500,000	1 Paket	1,500,000	1 Paket	1,500,000	1 Paket	1,600,000	1 Paket	1,600,000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1,500,000	1 Paket	1,500,000	1 Paket	1,500,000	1 Paket	1,600,000	1 Paket	1,600,000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1,500,000	1 Paket	1,500,000	1 Paket	1,500,000	1 Paket	1,600,000	1 Paket	1,600,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	9,000,000	12 Laporan	9,300,000	12 Laporan	9,606,000	12 Laporan	9,518,120	12 Laporan	9,836,482	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	50,000,000	100%	51,000,000	100%	62,020,000	100%	68,260,400	100%	69,625,608	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit	7,584,780	1 Unit	7,884,780	1 Unit	25,520,000	1 Unit	28,760,400	1 Unit	28,725,608	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	6,000,000	1 Unit	6,000,000	1 Unit	6,050,000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit	5,000,000	2 Unit	5,000,000	2 Unit	6,000,000	2 Unit	6,000,000	2 Unit	6,050,000	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		2 Unit	15,000,000	2 Unit	15,000,000	2 Unit	18,000,000	2 Unit	21,000,000	2 Unit	22,300,000	
Pengadaan Gedung Kantor atau Banguan Lainnya	Jumlah Unit Bangunan Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		1 Unit	12,415,220	1 Unit	13,115,220	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	6,500,000	1 Unit	6,500,000	1 Unit	6,500,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	40,000,000	100%	40,800,000	100%	41,616,000	100%	42,448,320	100%	43,297,286	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	30,000,000	12 Laporan	30,800,000	12 Laporan	31,616,000	12 Laporan	32,448,320	12 Laporan	33,297,286	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	10,000,000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	30,000,000	100%	30,600,000	100%	41,212,000	100%	42,036,240	100%	42,876,965		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	7,000,000	1 Unit	7,000,000	1 Unit	7,000,000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		16 Unit	8,000,000	16 Unit	8,000,000	16 Unit	10,000,000	16 Unit	10,000,000	16 Unit	10,000,000		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		2 Unit	3,000,000	2 Unit	3,000,000	2 Unit	3,500,000	2 Unit	3,500,000	2 Unit	3,500,000		
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		2 Unit	3,000,000	2 Unit	3,000,000	2 Unit	3,500,000	2 Unit	3,500,000	2 Unit	3,500,000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	11,000,000	1 Unit	11,600,000	1 Unit	17,212,000	1 Unit	18,036,240	1 Unit	18,876,965		
Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	12304.770 Ton	13054.13 Ton	5,000,000,000	13445.75 Ton	5,098,000,000	13849.13 Ton	5,240,744,000	14264.6 Ton	5,439,892,272	14692.54 Ton	5,613,968,824		
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Kelompok Nelayan Yang Terjamin dan terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap	59.31%	62.07%	4,600,000,000	65.52%	4,698,000,000	68.97%	4,840,744,000	72.41%	5,039,892,272	75.86%	5,213,968,824		
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (unit)		1 Unit	1,000,000,000	1 Unit	1,075,000,000	1 Unit	1,125,000,000	1 Unit	1,175,000,000	1 Unit	1,210,000,000	
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	117 Unit	125 unit	3,500,000,000	130 unit	3,523,000,000	135 unit	3,615,744,000	140 unit	3,764,892,272	145 unit	3,903,968,824	
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	100%	20%	400,000,000	40%	400,000,000	60%	400,000,000	80%	400,000,000	100%	400,000,000	
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	20 orang	50 org	300,000,000	50 org	300,000,000	50 org	300,000,000	50 org	300,000,000	50 org	300,000,000	
Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)		4 kelompok	100,000,000	4 kelompok	100,000,000	4 kelompok	100,000,000	4 kelompok	100,000,000	4 kelompok	100,000,000	
Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	11.9345 Ton	12.66 Ton	1,000,000,000	13.04 Ton	1,019,600,000	13.43 Ton	1,048,148,800	13.84 Ton	1,087,978,454	14.25 Ton	1,122,793,764	
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase surat izin usaha bidang pembudidayaan ikan yang diterbitkan		20%	50,000,000	40%	50,000,000	60%	50,000,000	80%	50,000,000	100%	50,000,000	
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing (Rekomendasi)		2 Rekomendasi	25,000,000	2 Rekomendasi	25,000,000	2 Rekomendasi	25,000,000	2 Rekomendasi	25,000,000	2 Rekomendasi	25,000,000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan		2 Rekomendasi	25,000,000	2 Rekomendasi	25,000,000	2 Rekomendasi	25,000,000	2 Rekomendasi	25,000,000	2 Rekomendasi	25,000,000	
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Cakupan Bina Kelompok Budidaya	100%	17,42%	250,000,000.00	36,13%	250,000,000.00	56,13%	250,000,000.00	77,42%	250,000,000.00	100%	250,000,000.00	
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	16 Kelompok	16 Kelompok	100,000,000	16 Kelompok	100,000,000	16 Kelompok	100,000,000	16 Kelompok	100,000,000	16 Kelompok	100,000,000	
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)		2 kelompok	25,000,000	2 kelompok	25,000,000	2 kelompok	25,000,000	2 kelompok	25,000,000	2 kelompok	25,000,000	
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)		1 kelompok	25,000,000	1 kelompok	25,000,000	1 kelompok	25,000,000	1 kelompok	25,000,000	1 kelompok	25,000,000	
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	4 Kelompok	4 Kelompok	100,000,000	4 Kelompok	100,000,000	4 Kelompok	100,000,000	4 Kelompok	100,000,000	4 Kelompok	100,000,000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Kelompok Pembudidaya Yang Terjamin dan terpenuhi kebutuhan sarpras usaha perikanan budidaya		12,50%	700,000,000	28,75%	719,600,000	48,75%	748,148,800	72,50%	787,978,454	100%	822,793,764	
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)		1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)		1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	10 Unit	10 Unit	250,000,000	10 Unit	269,600,000	10 Unit	298,148,800	10 Unit	337,978,454	10 Unit	372,793,764	
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Orang)	20 Orang	20 orang	50,000,000	20 orang	50,000,000	20 orang	50,000,000	20 orang	50,000,000	20 orang	50,000,000	
Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit)		1 unit	25,000,000	1 unit	25,000,000	1 unit	25,000,000	1 unit	25,000,000	1 unit	25,000,000	
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan (Dokumen)		1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan terhadap Peraturan di Bidang Perikanan	28%	52%	200,000,000	64%	203,920,000	76%	209,629,760	88%	217,595,690	100%	224,558,752	
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat Pengawas perikanan yang dibina	100%	16,67%	200,000,000	36,67%	203,920,000	57,78%	209,629,760	78,89%	217,595,690	100%	224,558,752	
Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)		10 Pelaku Usaha	60,000,000	10 Pelaku Usaha	63,920,000	10 Pelaku Usaha	69,629,760	10 Pelaku Usaha	77,595,690	10 Pelaku Usaha	84,558,752	
Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)		5 Pelaku Usaha	40,000,000	5 Pelaku Usaha	40,000,000	5 Pelaku Usaha	40,000,000	5 Pelaku Usaha	40,000,000	5 Pelaku Usaha	40,000,000	
Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)		25 Pelaku Usaha	100,000,000	25 Pelaku Usaha	100,000,000	25 Pelaku Usaha	100,000,000	25 Pelaku Usaha	100,000,000	25 Pelaku Usaha	100,000,000	
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	43.40 kg/kapita/tahun	45.92 kg/kapita/tahun	3,100,000,000	47.24 kg/kapita/tahun	3,160,760,000	48.59 kg/kapita/tahun	3,249,261,280	49.99 kg/kapita/tahun	3,372,733,208	51.42 kg/kapita/tahun	3,480,660,670	
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase Poklakaar yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		20%	50,000,000	40%	50,000,000	60%	50,000,000	80%	50,000,000	100%	50,000,000	
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)		1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase unit usaha hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan		20%	50,000,000	40%	50,000,000	60%	50,000,000	80%	50,000,000	100%	50,000,000	
Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	4 Unit Usaha	5 Unit Usaha	50,000,000	5 Unit Usaha	50,000,000	5 Unit Usaha	50,000,000	5 Unit Usaha	50,000,000	5 Unit Usaha	50,000,000	
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kelompok poklaksar yang terfasilitasi sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan		20%	3,000,000,000	40%	3,060,760,000	60%	3,149,261,280	80%	3,272,733,208	100%	3,380,660,670	
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Ton)	12304.770 Ton	13054.13 Ton (Pembangunan 1 Unit Pabrik Es)	2,700,000,000	13445.75 Ton	2,760,760,000	13849.13 Ton	2,790,760,000	14264.6 Ton	2,910,231,928	14692.54 Ton	3,008,159,390	
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	300,000,000	20 Pelaku Usaha	300,000,000	20 Pelaku Usaha	358,501,280	20 Pelaku Usaha	362,501,280	20 Pelaku Usaha	372,501,280	

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	1 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
			- Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
			- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
			- Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
			2 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			- Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
2	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
			Penyediaan Data dan Informasi	
			- Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penjaminan Ketersediaan Sarana	
			- Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
			Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
			- Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
3	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha	
			- Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	
4	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan terhadap Peraturan di Bidang Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
			- Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
			- Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
			- Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	

4.5 Uraian Sub Kegiatan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	
2	Produksi Perikanan	Ton	12686.2	13066.8	13459	13862.56	14278.44	14707	

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perikanan sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	12673.91	13054.13	13445.75	13849.13	14264.6	14692.54	
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	12.29	12.66	13.04	13.43	13.84	14.25	
3	Persentase Kepatuhan terhadap Peraturan di Bidang Perikanan	%	40	52	64	76	88	100	
4	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita /Tahun	44.64	45.92	47.24	48.59	49.99	51.42	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Ende berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dari 2025-2029, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Ende 2025-2029.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan adanya partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh Dinas Perikanan Kabupaten Ende, karena akan menentukan suatu keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Renstra 2025-2029 ini bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders dan merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai.

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Ende adalah :

1. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Ende untuk periode tahunan pada masa perencanaan;
2. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan atas kinerja tahunan dan lima tahunan;
3. Harapan kedepan Dinas Perikanan Kabupaten Ende adalah memperbaiki kinerja dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan yaitu agar :
 - Meningkatkan produksi perikanan tangkap;
 - Meningkatkan produksi perikanan budidaya;
 - Meningkatkan Angka Konsumsi Ikan;
 - Meningkatkan nilai tambah produk olahan hasil perikanan.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditetapkan secara konsisten Dinas Perikanan Kabupaten Ende, dapat dalam rangka mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berkesinambungan bagi masyarakat Kabupaten Ende.



BUPATI ENDE,

YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Dinas Perikanan	
Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Dinas Perikanan	